

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Indikator Kinerja berikut Kelompok Sasarannya. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat tersusun APBD BKPSDM yang efektif dan efisien karena rencana program dan kegiatan didalamnya telah memperhitungkan target kinerja dan alokasi anggaran.

Menyadari pentingnya Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag dan Subkoordinator di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak tahun 2025.

Pontianak, Agustus 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja suatu organisasi pemerintah pusat / daerah dianggap berhasil apabila capaian kinerja organisasi baik secara fisik maupun keuangan, telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan rencana anggaran yang disusun pada tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, penetapan target kinerja dalam rencana kerja tahunan organisasi pemerintah pusat/daerah harus benar-benar mempertimbangkan segala bentuk sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 103 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, Kepala Badan bertugas merumuskan kebijakan teknis dan bertanggung jawab kepada Walikota Pontianak melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak, dan di dukung oleh dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak. Dengan adanya kebijakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka perlu upaya optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2025 dalam melaksanakan perencanaan pembangunan harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2025

merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan pada tahun 2025. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang kepegawaian. Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak tahun 2025 tidak boleh lepas dari beberapa hal diantaranya :

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kepegawaian dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kepegawaian pada tahun sebelumnya. Pernyataan di atas dapat diartikan, bahwa pembangunan yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2024 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025 ini.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun satu tahun berikutnya sekaligus mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dikembangkan dengan baik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 124).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 30).
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar penyelenggaraan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari renstra perangkat daerah periode 2024-2026. Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama baru berjalan beberapa bulan sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi tahunan. Untuk itu, pengisian Tabel 2.1.1 lebih diarahkan pada pengisian Urusan, Bidang Urusan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya di akhir tahun renstra (2026) dan target pada tahun berjalan (2024).

Beberapa kali perubahan regulasi tentang nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, dan satuannya menjadi salah satu kendala dalam penghitungan realisasi dan capaian. Misalnya setelah menetapkan indikator dan satuan pada saat penyusunan dokumen renstra, ternyata tahun berikutnya keluar aturan baru yang mewajibkan perubahan pada indikator dan satuan. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan evaluasi. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sudah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
BKPSDM Kota Pontianak
s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4				5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	3	KEPEGAWAIAN													
5	3	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80%	80%	80%	80%		85%	96,2%	115,54	80%	80%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		1, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	100%	100%	100%		100%	97,2 %	97,2	100%	100%	100%
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2	2	100
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50	2	2	100
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	4	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	12	100
		Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	48 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	100	16	16	100
		2. Mutasi dan Promosi ASN	80%	80%	80%	80%		80%	80%	100	80	80	100
		Pengelolaan Mutasi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	4	100
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2	2	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	4	100
		3. Pengembangan Kompetensi ASN	70%	70%	70%	70%		100	100		70	70	100
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	6000 Orang		313	352	112,5	2000	2000	100
		Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	67	4	4	100
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2	2	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	80 Orang	80 Orang	80 Orang	240 Orang		30	30	100	80	80	100
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2	2	100
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	200 Orang	200 Orang	200 Orang	600 Orang		35	5	14	200	200	100
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100	4	4	100
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	250 Orang	250 Orang	250 Orang	240 Orang		300 Orang	1067 Orang	355,67	250	250	100
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	600 Orang		300 Orang	80 Orang	114,3	200	200	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4	4	100
		4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100	100	100	100
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	4	100
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1439 orang	1439 orang	1439 orang	4317 orang		252 orang	585 orang	232	1439	1439	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	50 orang	50 orang	50 orang	150 orang		100 orang	118 orang	118	50	50	100
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		0	0	0	4	4	100
		Pembinaan Disiplin ASN	1700 orang	1700 orang	1700 orang	5100 orang		1110 orang	493 orang	44,41	1200	1200	70,5882353
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 laporan	4 laporan	4 laporan	12 laporan		4 laporan	4 laporan	100	4	4	100
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	80%	80%	80%	80%		80	80	100	80	80	100
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	100	100
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2	2	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	4	4	100
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
		KEPEGAWAIAN											

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%	95%	95%	95%					95	95	100
	1, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%					100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	1	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	12 laporan		4 laporan	4 laporan	100	4	4	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1	1	100
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100	100	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang / Bulan	55 Orang / Bulan	55 Orang / Bulan	55 Orang / Bulan		53	50	94,34	55	55	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1	1	100
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	75	4	4	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12	12	100
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100	100	100	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	3 Paket	9 Paket		2 Paket	2 Paket	100	3	3	100
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100	100	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	10 paket	10 paket	30 paket		10 paket	10 paket	100	10	10	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100	12	12	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100	12	12	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	112 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	4	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	10 laporan	10 laporan	30 laporan		10 laporan	7 laporan	70	10	10	100
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	85%	85%	85%		100%	100%	100	85	85	100
		Pengadaan Mebel	30 Unit	30 Unit	30 Unit	90 Unit		0	0	0	30	30	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit	34 Unit	34 Unit	102 Unit		34 Unit	34 Unit	100	34	34	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4	4	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4	4	100
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4	4	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12	12	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026				Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			2024	2025	2026	Target Akhir		Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	85%	85%	85%		100%	100%	100	85	85	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100	2	2	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57 Unit	57 Unit	57 Unit	57 Unit		57 Unit	56 Unit	98,25	57	57	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak untuk mengemban sebahagian tugas dari Walikota Pontianak di bidang kepegawaian, mulai dari perencanaan akan kebutuhan pegawai sampai dengan pendistribusian dan penataan pegawai guna mewujudkan pegawai yang berkualitas, kompeten dan profesional sehingga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari KKN.

RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026 telah menetapkan bahwa tujuan BKPSDM adalah Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama Terwujudnya Sistem Merit dalam manajemen ASN Kota Pontianak. Berdasarkan PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2018 tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Berdasarkan hasil perhitungan mandiri yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Pontianak. Indeks profesionalitas ASN Kota Pontianak tahun 2023 adalah sebesar 63.4 dengan kategori rendah.

Hasil tersebut menggambarkan bahwa tingkat profesionalitas ASN rata-rata masih rendah. Diperlukan langkah-langkah dan tindakan yang signifikan untuk meningkatkan profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pontianak terutama pada dimensi kompetensi dengan memperbanyak penyelenggaraan kegiatan diklat, bimtek, *workshop* dan sejenisnya bagi ASN Pemerintah Kota Pontianak.

Selanjutnya untuk melakukan penilaian terhadap Indeks Sistem Merit, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah membuat Peraturan Kepala KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah yang memuat 8 (delapan) aspek dalam penilaian Sistem Merit. Tahun 2023 target Indeks Sistem Merit di Kota Pontianak ditetapkan sebesar 325. Berkat usaha dan kerja keras bersama, capaian indeks sistem merit Kota Pontianak tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 331,5 dengan predikat Sangat Tinggi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kota Pontianak Indikator : Indeks Sistem Merit		√	325	325	327	329	331,5	0	331,5	329	
	Program Kepegawaian Daerah Indikator : Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		√	80	100%	100%	100%	101,49	0	100%	100%	
	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Indikator : Persentase ASN yang ditingkatkan Kemampuan Manajerial dan Fungsional		√	85	80%	80%	80%	77,59	0	80%	80%	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)		√					73,8				

	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)		√					17,3				
	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)		√					52,4				

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang kepegawaian, adapun isu-isu tersebut antara lain :

- a) Kualitas sumber daya aparatur masih belum ideal, dan belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terhadap Peraturan Kepegawaian terjadi ;
- b) Jumlah Sumber Daya Aparatur yang masih belum ideal sehingga terjadi kekurangan pegawai ;
- c) Masih rendahnya nilai profesionalitas individu sebagian besar ASN ;
- d) Mutasi, Rotasi, dan Promosi belum sesuai dengan sistem pola karir;

Selain isu-isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Kekuatan :

- a. Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang jelas.
- b. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- c. Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan tujuan BKPSDM Kota Pontianak guna mencapai visi Kota Pontianak.

2. Kelemahan :

- a. Sistem informasi kepegawaian yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
- b. Pengelolaan dan pengembangan data masih lemah.
- c. Belum optimalnya aktualisasi dari sumber daya aparatur yang ada.
- d. Terdapat perbedaan antara kompetensi ASN dengan penempatan jabatan di Unit Kerja Perangkat Daerah.

3. Peluang :

- a. Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi.
- b. Tingginya komitmen Kepala Daerah untuk penegakan disiplin aparatur.
- c. Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan lembaga lain.

4. Tantangan :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh ASN.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat harus disejajarkan dengan mekanisme kerja aparatur.
- c. Peran masyarakat terbuka secara luas untuk mengukur kinerja aparatur.

5. Rekomendasi :

- a. Mengikutsertakan ASN Pemerintah Kota Pontianak ke dalam pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional baik yang dibiayai dari APBD maupun APBN.
- b. Mendorong ASN Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kompetensi baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan klasikal dan non klasikal.
- c. Membangun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem informasi dari lembaga terkait.
- d. Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian serta memperjelas sistem *reward* dan *punishment* bagi ASN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Dalam rancangan awal RKPD BKPSDM Tahun 2025 anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan adalah sebesar Rp 15.495.559.000,-. Berdasarkan analisa terhadap kebutuhan terutama untuk pengembangan kompetensi ASN, untuk tahun 2025 BKPSDM mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 683.667.000,- sehingga anggaran BKPSDM untuk tahun 2025 menjadi Rp 16.961.658.000,00. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja,

target/tolak ukur dan besaran dan yang dibutuhkan pada anggaran tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Pontianak	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80	%	4.938.808.049	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Pontianak	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80	%	5.533.044.049	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pontianak	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	100	%	689.341.795	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pontianak	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	100	%	689.341.795	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dok	17.500.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dok	17.500.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dok	566.911.795	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dok	566.911.795	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dok	43.878.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dok	43.878.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dok	55.452.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dok	55.452.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16	Dok	5.600.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16	Dok	5.600.000	

2	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Pontianak	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	80	%	595.156.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Pontianak	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	80	%	595.156.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dok	97.020.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dok	97.020.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Pontianak	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dok	100.726.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Pontianak	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dok	100.726.000	
	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	Dok	397.410.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	Dok	397.410.000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Pontianak	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	70	%	2.449.200.560	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Pontianak	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	70	%	3.043.436.560	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	2000	ASN	686.669.620	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	2000	ASN	1.280.905.620	
	Pengelolaan Assessment Center	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Centre	4	Dok	155.610.300	Pengelolaan Assessment Center	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Centre	4	Dok	155.610.300	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dok	75.528.340	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dok	75.528.340	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	Orang	669.544.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	Orang	669.544.000	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dok	435.123.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dok	435.123.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	35	ASN	164.678.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	35	ASN	164.678.000	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250	Orang	242.797.300	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250	Orang	242.797.300	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Pontianak	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200	Orang	4.250.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Pontianak	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200	Orang	4.250.000	

	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4	laporan	15.000.000	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4	laporan	15.000.000	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Pontianak	Persentase ASN yang berintegritas	100	%	1.205.109.694	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Pontianak	Persentase ASN yang berintegritas	100	%	1.205.109.694	
	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1200	Orang	244.903.944	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1200	Orang	244.903.944	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	laporan	101.100.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	laporan	101.100.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1439	Orang	522.430.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1439	Orang	522.430.000	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50	Orang	17.550.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50	Orang	17.550.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4	Dok	37.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4	Dok	37.000.000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	Dok	282.125.750	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	Dok	282.125.750	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Pontianak	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	80	%	1.246.629.772	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Pontianak	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional		%	1.246.629.772	
5	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Pontianak	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional	100	%	1.246.629.772	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Pontianak	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional	100	%	1.246.629.772	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	Laporan	1.185.554.972	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	Laporan	1.185.554.972	

	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4	laporan	61.074.800	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4	laporan	61.074.800	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100	%	9.384.552.179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			10.181.984.179,00	
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100	%	50.636.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah			65.636.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	15.966.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	30.966.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	7.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	7.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	12.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	12.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	10.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	10.900.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	4.270.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	4.270.000	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase Laporan Keuangan yang disusun	100	%	7.121.989.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase Laporan Keuangan yang disusun	100	%	7.196.420.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang / Bulan	7.095.559.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang / Bulan	7.169.990.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.230.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.230.000	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dok	11.000.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dok	11.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	13.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	13.200.000	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase Pelayanan administrasi kantor	100	%	572.276.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase Pelayanan administrasi kantor	100	%	572.276.250	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	277.136.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	277.136.150	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	128.051.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	128.051.400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10.000.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10.000.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	145.088.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	145.088.000	
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan barang inventaris	85	%	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan barang inventaris	85	%	200.000.000	

	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	Unit	100.000.000	
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelayanan urusan adminitrasi kantor	100	%	901.789.029	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelayanan urusan adminitrasi kantor	100	%	901.789.029	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	28.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	28.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	588.717.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	588.717.800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	40.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	40.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	244.871.229		Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	244.871.229	
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase barang inventaris yang dipelihara	85	%	355.120.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase barang inventaris yang dipelihara			355.120.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	57.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	57.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	unit	197.320.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	unit	197.320.000	
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	108.310.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	108.310.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	108.310.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	108.310.000	
	Total					15.495.559.000						16.164.226.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. BKPSDM Kota Pontianak merupakan perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepegawaian bagi ASN Pemerintah Kota Pontianak. Oleh sebab itu untuk tahun 2025 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap BKPSDM Kota Pontianak.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program....	NIHIL			
	Kegiatan....				
	Sub Kegiatan				
	- cth. Pelatihan Penanggulangan Bencana				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen untuk membangun sistem manajemen ASN yang dituangkan dalam Visi BKN 2020-2024 yaitu : ***“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*** Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara yaitu Profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai BKN adalah “Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK
- b. Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020-

2024 yaitu **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”**”.

Salah satu Sasaran Strategis dari Kemenpan RB adalah: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera Yang dimaksud dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yaitu menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan tingkat kesejahteraan yang cukup yang tidak hanya berupa kompensasi material namun juga non material.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini akan dilihat dari:

- a. Indeks Sistem Merit
- b. Indeks Profesionalitas ASN

Terkait dengan sasaran Renstra Kemenpan RB, Renstra BKPSDM memiliki tujuan dan indikator tujuan yang selaras dengan sasaran Renstra BKN yaitu “Meningkatkan Profesionalitas ASN” dengan indikator tujuan “Indeks Profesionalitas ASN”. Hal ini menunjukkan bahwa renstra BKPSDM tahun 2024-2026 telah sejalan dengan renstra Kemenpan RB tahun 2020-2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Pontianak Tahun 2025 selaras dengan RPD Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan indikator sasaran yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh

karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yaitu Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kota Pontianak dengan indikator Indeks Sistem Merit.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN /	Sedang (71)	Sedang (73)	Sedang (75)
	Terwujudnya sistem merit dalam Manajemen ASN Kota Pontianak	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (331,5)	Sangat Baik (331,5)

3.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 meliputi :

a. Program/Kegiatan/ Subkegiatan

1. Program Kepegawaian Daerah

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Rencana Aksi

- Penyusunan Usulan Kebutuhan Manual ke BKN
- Usulan Kebutuhan ASN ke Menpan RB

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Rencana Aksi

- Seleksi Penerimaan ASN sesuai Formasi
- Seleksi Kompetensi Penerimaan PPPK

- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Rencana Aksi

- Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun Pegawai

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Rencana Aksi

- Pemutakhiran database Kepegawaian dengan SAPK / SIASN dan SIMPEG

- Pengelolaan Data Kepegawaian

Rencana Aksi

- Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sub kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi ASN

Rencana Aksi

- Pelaksanaan Tes Mutasi Masuk PNS

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Rencana Aksi

- Layanan Administrasi Kepegawaian dan Akurasi Data Kenaikan Pangkat ASN

- Pengelolaan Promosi ASN

Rencana Aksi

- Pelaksanaan Seleksi Pengisian JPT Pratama dan Rotasi JPT Pratama,

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Sub kegiatan:

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Rencana Aksi

- Penyelenggaraan Workshop / Pelatihan / Bimtek bagi Aparatur

- Pengelolaan Assessment Center

Rencana Aksi

- Kegiatan Assessment PNS

- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Rencana Aksi

- Kegiatan Ujian Dinas

- Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Rencana Aksi

- Bantuan Beasiswa Tugas Belajar PNS

- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Rencana Aksi

- Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Esselon 2 dan 3

- Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

Rencana Aksi

- Fasilitasi uji kompetensi bagi ASN Jabatan Fungsional Tertentu

- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Rencana Aksi

- Sosialisasi Peraturan JFT

- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

- Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

Rencana Aksi

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Sub kegiatan:

- Pembinaan Disiplin ASN

Rencana Aksi

- Pelaksanaan Tes Urin Pegawai

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Rencana Aksi

- Sosialisasi / Bimtek Perencanaan dan Penilaian Kinerja
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Rencana Aksi

- Baperdispeg, Kegiatan Pelayanan
 - Pelayanan Proses Izin Perceraian
 - Pemeriksaan Kasis Pelanggaran Disiplin
 - Monev Hari Raya Idul Fitri
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Rencana Aksi :

- Seleksi ASN Berprestasi
 - Pembinaan Mental dan Spiritual
- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

Rencana Aksi

- Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur

Rencana Aksi

- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIM TPP

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Rencana Aksi

- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

- b. Pengembangan Kompetensi Teknis

- Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan

Rencan Aksi

- Evaluasi Pasca Diklat

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rencana Aksi
 - Penyusunan PK dan Rencana Kerja
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD
Rencana Aksi
 - Penyusunan RKA Murni
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD
Rencana Aksi
 - Penyusunan RKA Perubahan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Perangkat Daerah
Rencana Aksi
 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rencana Aksi
 - Penyusunan Buku Profil
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rencana Aksi
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
Rencana Aksi
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Rencana Aksi
 - Penyusunan Tindak Lanjut LHP
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Perangkat Daerah
Rencana Aksi
 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub kegiatan:
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rencana Aksi
 - Pengadaan Barang Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Rencana Aksi

- Cetak Kertas berkop
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Rencana Aksi :

- Pengadaan Komponen listrik
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Rencana Aksi

- Langganan Surat Kabar
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah

Rencana Aksi

- Rapat Koordinasi Luar Daerah

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Pengadaan Mebel

Rencana Aksi

- Pengadaan Mebel Kantor
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana Aksi

- Pengadaan Peralatan Elektronik Kantor

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rencana Aksi

- Paket Pengiriman dan Pengadaan Materai
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rencana Aksi

- Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik serta Sistem Informasi, serta Pembayaran Listrik, telepon, Air dan Internet
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana Aksi

- Sewa Lapangan Olahraga
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rencana Aksi

- Keikutsertaan Pameran Pembangunan

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana Aksi

- Pemeliharaan Gedung Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rencana Aksi

- Pemeliharaan Motor dan Mobil Dinas
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana Aksi

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Rencana Aksi

- Pengadaan Pakaian Dinas dan Batik ASN

b. Proyek Strategis

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN meliputi 4 dimensi penilaian yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Demikian pula dengan Indeks Sistem Merit yang menjadi sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminatif.

Dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis, BKPSDM Kota Pontianak telah menetapkan proyek-proyek strategis yang harus dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas ASN
2. Promosi dan Mutasi berdasarkan manajemen talenta.
3. Perencanaan kebutuhan serta pengadaan ASN sesuai kompetensi
4. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial PKP, PKA dan PKN
5. Pemberian Reward bagi ASN Berprestasi dan Punishment sesuai ketentuan
6. Sistem Informasi kepegawaian yang terintegrasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2024-2026, untuk rencana kerja tahun 2025 BKPSDM Kota Pontianak memiliki 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 49 (Empat puluh sembilan) subkegiatan. Untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 16.961.658.000,00,- yang bersumber dari APBD Kota Pontianak dengan rincian seperti pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						16.961.658.000,00							16.490.151.205,00	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						16.961.658.000,00							16.490.151.205,00	
	5	0			KEPEGAWAIAN						15.715.028.228,00							15.243.521.433,00	
1	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	95 Persen			95 Persen	10.181.984.179,00						95 Persen	10.181.984.179,00	
	5	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100Persen			100 Persen	65.636.900,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	100Persen	65.636.900,00	
	5	0	0	2.0	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	30.966.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	30.966.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	7.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	1 Dokumen	7.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
	5	0	0	2.0	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	12.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	1 Dokumen	12.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	10.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	4 Laporan	10.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	4.270.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	1 Laporan	4.270.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	7.978.852.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	100Persen	7.978.852.000,00	
	5	0	0	2.0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan			55 Orang/bulan	7.952.422.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM-	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	55 Orang/bulan	7.952.422.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
												PENDAPATAN ASLI DAERAH							
	5	0	0	2.0	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	2.230.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	1 Laporan	2.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen			4 Dokumen	11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	13.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	12 Laporan	13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100Persen		100 Persen	108.310.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	100Persen	108.310.000,00	
	5	0	0	2.0	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			3 Paket	108.310.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	3 Paket	108.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	572.276.250,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	100Persen	572.276.250,00	
	5	0	0	2.0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	10.000.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	10 Paket	10.000.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	277.136.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	12 Paket	277.136.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	128.051.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	12 Paket	128.051.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			4 Dokumen	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			10 Laporan	145.088.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	10 Laporan	145.088.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	85Persen		85 Persen	200.000.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	85Persen	200.000.000,00		
	5	0	0	2.0	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit			30 Unit	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	30 Unit	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit			34 Unit	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	34 Unit	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100Persen		100 Persen	901.789.029,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	-	100Persen	901.789.029,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
	5	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	85Persen			85 Persen	355.120.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	85Persen	355.120.000,00	
	5	0	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			2 Unit	57.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	2 Unit	57.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit			57 Unit	197.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	57 Unit	197.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	1 Unit	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	5	0	0		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80Persen			80 Persen	5.533.044.049,00					80Persen	5.061.537.254,00		
	5	0	0	2.0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	100Persen			100 Persen	689.341.795,00		-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	100Persen	812.071.000,00		
	5	0	0	2.0	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen			2 Dokumen	17.500.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	2 Dokumen	17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen			2 Dokumen	566.911.795,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	2 Dokumen	689.641.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen			4 Dokumen	43.878.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	43.878.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	55.452.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	12 Dokumen	55.452.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen			16 Dokumen	5.600.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	16 Dokumen	5.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	80Persen		80 Persen	595.156.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	80Persen	595.156.000,00		
	5	0	0	2.0	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	97.020.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	97.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen			2 Dokumen	100.726.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	2 Dokumen	100.726.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0003	Pengelolaan Promosi ASN														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen			4 Dokumen	397.410.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	397.410.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	70Persen		70 Persen	3.043.436.560,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	70Persen	2.449.200.560,00	
	5	0	0	2.0	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN													
						Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	2000 Orang			2000 Orang	1.280.905.620,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	2000 Orang	686.669.620,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0002	Pengelolaan Assessment Center													
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen			4 Dokumen	155.610.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	155.610.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen			2 Dokumen	75.528.340,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	2 Dokumen	75.528.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang			80 Orang	669.544.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	80 Orang	669.544.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4 Laporan			4 Laporan	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi	100Persen		100 Persen	1.205.109.694,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	100Persen	1.205.109.694,00	
	5	0	0	2.0	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen			4 Dokumen	282.125.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	282.125.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1439 Orang			1439 Orang	522.430.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	1439 Orang	522.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai													
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang			50 Orang	17.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	50 Orang	17.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2.0	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4 Dokumen			4 Dokumen	37.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0007	Pembinaan Disiplin ASN													
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1700 Orang			1200 Orang	244.903.944,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	1700 Orang	244.903.944,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan			4 Laporan	101.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	4 Laporan	101.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.246.629.772,00							1.246.629.772,00		
3	5	0	0		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	80 Persen		80 Persen	1.246.629.772,00						80 Persen	1.246.629.772,00		
	5	0	0	2.0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional	100Persen		100 Persen	1.246.629.772,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-	100Persen	1.246.629.772,00		
	5	0	0	2.0	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan			2 Laporan	1.185.554.972,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	2 Laporan	1.185.554.972,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	2.0	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4 Dokumen			4 Dokumen	61.074.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	4 Dokumen	61.074.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
J U M L A H											16.961.658.000,00							16.490.151.205,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM Kota Pontianak tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2024-2026.. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam RENJA diharapkan akan lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan menitikberatkan pada pencapaian kinerja.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2025 ini. Keberhasilan pelaksanaan RENJA BKPSDM Kota Pontianak tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN BKPSDM Kota Pontianak serta *stakeholder* yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Pontianak



Yuni Rosdiah, S.IP, M.Si
Perbina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690606 198903 2 007